

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI PERTENGAHAN KEDUA FEBRUARI 2012

Kegiatan pertengahan Februari, masih pada Masa Persidangan III 2011-2012, tetap berkonsentrasi pada tugasnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran.

Berikut ringkasan untuk minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam bidang legislasi yang perlu diangkat dalam minggu ini adalah kegiatan pembahasan RUU Bidang Ekuindag. Komisi IV saat ini sedang membahas RUU tentang Pangan, dan sudah memasuki pembahasan ditingkat Panja. Beberapa masalah yang menjadi pembahasan secara mendalam adalah tentang kelembagaan di bidang pangan, masalah implementasi konsep kedaulatan, ketahanan, dan ketersediaan pangan, serta pengaturan pemasukan pangan dari luar negeri. Sementara itu RUU tentang Pencegahan dan Pembalakan Liar, sejak mengalami *dead-lock* masalah kelembagaan pada Masa Persidangan II yang lalu, sampai saat ini pembahasannya belum dapat dilanjutkan.

Komisi V bersama-sama dengan BALEG DPR sedang melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep terhadap RUU tentang Jalan.

RUU yang sedang ditangani Komisi VI yaitu RUU tentang Koperasi, saat ini masih dalam tahap rapat-rapat kerja dan akan segera masuk dalam pembahasan ditingkat Panja. Sedangkan untuk RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, karena Pemerintah baru menyerahkan DIM, maka belum dapat dilakukan pembahasan tingkat selanjutnya.

Komisi XI tengah membahas RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah yang saat ini sudah memasuki DIM ke-22 dari 500 DIM.

Untuk Komisi III yang ditugasi melakukan pembahasan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempersiapkan rapat dengar pendapat umum kepada pihak-pihak



terkait, termasuk LSM atau lembaga lain yang ingin berpartisipasi. Panjang RUU ini telah melaksanakan RDPU pada hari Selasa 21 Februari 2012. RDPU dimaksudkan agar RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat sesuai dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights Of The Child*) sebagai mana telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of The Child*. Komisi III selaku alat perlengkapan yang ditugasi menangani RUU ini mengundang partisipasi lembaga, institusi, organisasi profesional, LSM yang terkait bidang perlindungan anak untuk memberi saran dan masukan dalam kesempatan RDPU tersebut.

sempatan RDPU tersebut.

Pembahasan terhadap Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih terus berlangsung. Semula diagendakan RUU ini selesai pada akhir masa Persidangan III yang akan ditutup pada 9 April 2012. Namun demikian, masih banyak materi krusial yang belum ada kata sepakat diantara fraksi-fraksi yang ada di dalam panja RUU ini. Ada empat materi krusial dalam RUU ini yang diperkirakan pembahasannya cukup alot. Empat materi krusial tersebut adalah **system Pemilu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), alokasi kursi di daerah pemilihan, dan metode penghitungan suara**. Sampai saat ini fraksi-fraksi di DPR belum memiliki satu pandangan soal empat materi krusial tersebut. Oleh karena itu, Panja DPR sekarang ini lebih fokus kepada pembahasan masalah teknis penyelenggaraan. Minggu-minggu depan diharapkan diharapkan sudah ada semacam petunjuk/dari pimpinan fraksi/pimpinan partai sehubungan dengan materi yang krusial.

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arindyia **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Kusus untuk fungsi anggaran disampaikan laporan hasil Raker Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan Ketua Umum DEKOPIN beserta jajarannya yang berlangsung pada pertengahan bulan Februari. Dalam Raker disimpulkan antara lain: [1] Komisi VI dapat menerima dan mengapresiasi realisasi serapan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2011 sebesar Rp. 938.280.000.000, atau 94,36% dari anggaran yang dapat dilaksanakan sebesar Rp. 994.320.000.000. dan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp. 25.019.000.000 atau 2,47% serta sisa sebesar Rp. 56.004.000.000 atau sebesar 5,64% merupakan efisiensi. [2] Komisi VI menerima serapan anggaran DEKOPIN pada tahun 2011 sebesar Rp.45.993.000.000 atau 76,91% dari anggaran yang dapat di laksanakan sebesar Rp. 59.804.500.000 dan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp. 25.195.500.000. Komisi VI meminta agar DEKOPIN lebih mengoptimalkan anggaran yang ada. [3] Komisi VI meminta Kementerian Koperasi dan UKM dan DEKOPIN agar meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran DEKOPIN, sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat di laksanakan dengan baik, tidak mengalami hambatan.

Dalam RDP Komisi VIII DPR-RI dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Jateng, Jabar, DIY, Banten, Kalsel, Kalteng, kaltim dan Kalbar, berkaitan dengan Pelaksanaan APBN 2011 dan Rencana Pelaksanaan APBN 2012 menyimpulkan bahwa: meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam pelaksanaan anggaran 2012 hendaknya memperhatikan masukan dan saran Komisi VIII; meingkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; peningkatan penyerapan anggaran, baik pada fungsi pendidikan maupun fungsi agama; langkah-langkah terobosan dalam rangka merespon berbagai isu aktual di wilayah masing-masing; meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama pada masing-masing Kabupaten/Kota; pembuatan database mengenai tenaga pendidik yang belum/sudah tersertifikasi; peningkatan fungsi forum kerukunan umat beragama. Dalam rangka anggaran, perlu kelengkapan dokumen kaporan rencana kerja dan anggaran kementerian dan summary rencana kegiatan tahun 2012 di masing-masing anggota.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Komisi II telah melakukan Raker dengan MENPAN dan Refomasi Birokasi, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepada BPKP, pada pertengahan Februari. Kesimpulan rapat kerja antara lain mendukung pengembangan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) yang merupakan pedoman pengawasan di lingkungan birokrasi dan sebagai pendorong program percepatan Reformasi Birokasi, untuk menjamin kualitas birokrasi, khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan



penghargaan dan sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Instansi.

Komisi II meminta kepada kementerian PAN dan RB bersama BPKP dan BKN untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi, serta kabupaten dan kota secara tepat dan akurat.

Komisi V melakukan Rapat Dengar Pendapat Dengan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Ketua Komite Nasional KNKT, dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Banten, Polda Jatim. Terkait permintaan penjelasan terhadap penyebab berbagai kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini. Kesimpulannya antara lain: meminta Ditjen Perhubungan Darat dan Korps Lalu Lintas Polri untuk melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Khususnya kepada pengusaha angkutan umum untuk menjamin keselamatan dan meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan darat.

Komisi VI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik kementerian BUMN, Deputi Usaha Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis kementerian BUMN, beserta Direktur Utama PT. Djakarta Lloyd (Persero), dengan agenda permintaan Penjelasan terkait masalah kinerja PT. Djakarta Lloyd. Kesimpulan rapat tersebut antara lain agar Direksi PT. Djakarta Lloyd untuk sesegera mungkin menyampaikan laporan kinerja keuangan tahun 1990-2010, yang sudah teraudit maupun yang belum teraudit, kepada komisi VI DPR RI. Sebelum kemudian dapat ditentukan penyelesaian menyeluruh terkait PT. Djakarta Lloyd (persero).

Komisi VII rapat kerja dengan menteri Pengerjaan Umum, menteri Kehutanan dan Kapolri dengan agenda masukan menyangkut pengawasan dan pemanfaatan lahan untuk proses penetapan wilayah pertambangan sesuai UU no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 9 sampai dengan 33 kesimpulan. Komisi VII meminta kepada menteri TU selaku ketua pelaksana BKPRN berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk **mendorong** percepatan

Rencana Tata Ruang (RTR) pulau/kepulauan RTRW provinsi, kabupaten/kota dan melaporkan secara detail peruntukan ruang untuk wilayah pertambangan dalam RTRWN, RTR pulau/kepulauan, RTR kawasan strategis nasional (KSN) sebagai masukan dalam proses penetapan wilayah pertambangan.

Komisi VII meminta menteri kehutanan untuk memberi masukan terhadap kawasan hutan yang berpotensi mengalami tumpang tindih dalam proses penetapan wilayah pertambangan, meliputi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN).

Komisi X telah melakukan rapat kerja dengan menteri pendidikan dan kebudayaan RI untuk membahas Rintisan belajar 12 tahun; Evaluasi kebijakan RSBI; Pelaksanaan Dapodik Lanjutan; Pendidikan Vokasi; Jardiknas E-Pembelajaran; dan Program makanan tambahan anak sekolah. Komisi X juga melakukan Raker dengan metri Pemuda dan Olahraga untuk membahas: Evaluasi Pelaksanaan SEA Games XXVI dan ASEAN para Games tahun 2011; Pembahasan Pembangunan Pusat Pendidikan Latihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor; Pembahasan Sarana dan Prasarana Olahraga. Kesimpulannya antara lain, Komisi X DPR-RI mengapresiasi Pemerintah, KONI/KOI dan para pemangku kepentingan atas terselenggaranya SEA Games XXVI 2011 di Jakarta dan Palembang dengan meraih juara umum, dan terselenggaranya ASEAN Para Games VI 2011 di Solo-Jawa Tengah dengan merah juara kedua; Komisi X bersama Pemerintah sepakat bahwa prestasi SEA Games dan ASEAN Para Games untuk terus di pertahankan dan ditingkatkan.

Komisi XI dalam RDP dengan Deputi Gubernur BI, Direktur Tindak Pidana Umum Polri, Dirut PT. Bank UOB Indonesia dan 2 nasabah UOB, menyimpulkan: terkait dengan penu-

turan yang diungkapkan oleh 2 nasabah UOB, Dirut Pidana Umum mabes Polri dan Dirut PT. Bank UOB Indonesia, Komisi XI akan melakukan kajian mendalam terhadap penjelasan yang disampaikan, sebagai masukan untuk pembahasan mengenai berbagai pertauran yang mengatur penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan tunggakan kartu kredit dalam Raker Komisi XI dengan BI yang akan ditentukan kemudian; sebagai bahan kajian, Komisi XI meminta PT. Bank UOB Indonesia untuk memberikan data informasi mengenai kontrak/perjanjian antara PT. Bank UOB dengan perusahaan penyedia jasa pihak ketiga.

Kasus Bank Century

Kesimpulan Rapat Kerja Tim Pengawas Century dengan BPK dan KPK yang telah di selenggarakan pada 15 Februari 2012 adalah sebagai berikut: [1] Tim Pengawas mendorong KPK untuk segera menindak lanjuti 9 temuan Laporan Hasil Pemerintah (LHP) tahap I dan 13 temuan serta 2 informasi lainnya LHP tahap II sebagai kesimpulan BPK atas Kasus Century, sesuai UU No 15 tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [2] Tim pengawasan Century mendorong Pimpinan KPK untuk memperkuat kepastian dan melakukan evaluasi terhadap tim penyelidik yang menangani kasus Bank Century untuk menghindari *conflict of interest* sebagaimana diatur dalam **panduan** KPK. [3] Untuk menjaga netralitas dan mendapatkan informasi atau penjelasan yang akurat mengenai kasus Bank Century, Tim Pengawas Century menyepakati usulan KPK menyampaikan nama-nama **ahli** dimaksud sesegera mungkin. [4] Tim pengawas Century menyetujui menjelaskan KPK mengenai proses dan progres hasil penyelidikan akan disampaikan di kantor KPK. [6] KPK berjanji menyelesaikan kasus Century selambat-lambatnya akhir tahun 2012, sesuai dengan koridor hukum.*

Komisi I Dukung Revitalisasi LPP TVRI

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung proses revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/2).



Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq

Dalam Rapat Dengar Pendapat dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, dengan Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2011-2016 Immas Sunarya, Elprisdat, Indrawadi Tamin, Bambang Suprijanto, dan Ahmad Sofyan.

Selanjutnya, Dewan Pengawas LPP TVRI diminta untuk segera merumuskan rencana strategis revitalisasi LPP TVRI tahun 2011-2016, dengan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi I DPR RI.

Selain itu, Komisi I DPR RI minta

agar proses pemilihan Dewan Direksi LPP TVRI dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan terpilihnya Dewan Direksi LPP TVRI yang sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas LPP TVRI dan mampu menjalankan agenda revitalisasi TVRI.

Komisi I DPR RI juga meminta Dewan Pengawas LPP TVRI untuk mengawasi secara cermat realisasi anggaran LPP TVRI Tahun 2012 yang sementara ini dijalankan oleh PLT Direksi. (as) foto:parle

DPR Tinjau Konversi Lahan Food Estate di Kubu Raya, Kalimantan Barat

Ketua Komisi IV DPR RI, H.M Romahurmuzyi mengatakan tujuan kunjungan tim Komisi IV ke Kalimantan Barat, untuk melihat secara spesifik dan langsung pembangunan food estate di kabupaten Kubu Raya, yang pada tahun ini mendapatkan anggaran dari kementerian pertanian untuk percetakan sawah baru sebesar 1 Triliun Rupiah dengan asumsi 1 hektar sebesar 10 juta rupiah. “Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat sangat serius untuk mengembalikan luasan areal pertanian yang ada di Indonesia. Satu diantaranya dengan memperbanyak anggaran untuk pembukaan areal pertanian baru pada tahun ini,” tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Pertanian RI, dalam lima tahun terakhir terjadi konversi lahan pertanian ke perkebunan dengan seluas 100.000 hektare pertahun. Romahurmuzyi menyatakan, jika diasumsikan per hectare lahan dapat menghasilkan lima ton beras, maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan 500.000 ton beras.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI siap untuk mengawal rencana pemerintahan pusat dalam mengimbangi lajunya konversi lahan menjadi perkebunan yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Romahurmuzyi mengatakan laju konversi lahan perkebunan harus diimbangi dengan penetapan dan pembukaan kawasan baru, agar Indonesia tidak lagi kekurangan pangan seperti yang terjadi saat ini. Ia mencontohkan di Kalimantan Barat. Pada tahun ini pemerintah pusat telah menganggarkan Rp200 Miliar untuk pengembangan kawasan pertanian, termasuk pengembangan kawasan pangan di Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak dan Melawi.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan surplus beras, agar Indonesia tidak lagi mengimpor

Tim yang berjumlah 16 orang anggota, yang dipimpin ketua Komisi IV DPR RI, H.M Romahurmuzyi (F-PPP) didampingi wakil ketua komisi Anna Mu’awanah (F-PKB), dengan beranggotakan Drs. Jafar Nainggolan, Anton Sukartono Suratno, H.M Rosyid Hidayat, dan Maimara Tando (F-DEMOKRAT), Tetty Kadi Bawono dan Hardisoesilo (F-GOLKAR), Honning Sanny dan Bahrudin Syarkawie (F-PDIP), Rofi’ Munawar (F-PKS), Sukiman (F-PAN), Syaifullah Tamliha (F-PPP), Ibnu Multazam (F-PKB), Budi Heryadi (F-GERINDRA) dan Drs. Muradi Darmansyah (P-HANURA), melakukan peninjauan pembangunan Food Estate di desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian pengganti konversi lanjut lahan setiap tahun dari lahan pertanian ke non pertanian sekitar 100.000 hektar.



Ketua Komisi IV DPR RI, H.M. Romahurmuzyi

beras. “ Melalui keseriusan pemerintah pusat tersebut, kita juga akan serius menggiring pengembangan kawasan pertanian di setiap daerah dan kita sendiri yang akan mengawasi sejauh mana penyerapan tersebut dalam menciptakan lahan pertanian baru, “ kata Ketua Komisi IV DPR RI, H.M Romahurmuzyi.

Sementara itu, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian, Gatot Iriyanto kepada wartawan mengatakan permasalahan yang dialami Kementerian saat ini adalah, masih mencarinya luasan area yang lebih besar yang akan dipergunakan untuk mencetak lahan sawah. Oleh karena

itu, Kementerian Pertanian meminta kepada setiap daerah kabupaten yang mengusulkan perluasan area, dapat menerbitkan Peraturan Bupati. “ Semua sangat tergantung wilayahnya, DPRD serta masyarakatnya karena ada wilayah tertentu yang alih fungsinya lebih dasyat seperti provinsi riau, tetapi ada bupati yang ketat menjaga alih fungsi lahan sawahnya, itu sebabnya setelah UU No. 14 Tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Berkelanjutan keluar akan mengidentifikasi pemerintah mana yang konsentrasi terhadap mempertahankan lahan sawah “, ujar Gatot Iriyanto. (denus-TVP). foto:parle

Komisi IV DPR Prihatin, Produksi Susu Petani Harganya Masih Terlalu Rendah

Komisi IV DPR merasa prihatin dengan kondisi harga produksi susu sapi perah dipetani yang sampai saat ini harganya masih sangat terlalu rendah.



Dewan Persusuan Nasional saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI

Demikian yang dikatakan Anggota Komisi IV DPR-RI Ibnu Multadjam, keterangan ini disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Persusuan Nasional, rapat tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi IV DPR Senayan Jakarta, Selasa, (14/2) siang.

Ibnu Multadjam menambahkan, hingga saat ini harga susu di petani memang dirasa masih sangat rendah, maka hal ini harus ditemukan pola yang betul-betul menjawab petani ternak susu agar produksi mereka dapat meningkat, sehingga mereka mampu bersaing dan import susu harus dibatasi.

Anggota Komisi IV DPR Ibnu Multadjam mengemukakan bahwa produksi petani susu sampai saat ini betul-betul terhimpit oleh kekuatan-kekuatan susu import, maka pada tahun yang

lalu betul-betul kita butuh kedaulatan dibidang pangan terutama di bidang persusuan.

Sementara Dewan Persusuan Nasional Teguh Boeduyana mengatakan, hingga saat ini peternak sapi menjadi terpinggirkan karena saat dilepas ke pasar bebas tanpa ada perlindungan dari pemerintah.

Teguh Budiyan juga menambahkan, terkait berbagai persoalan yang dihadapi, pemerintah seolah-olah tidak peduli dengan nasib peternak. Masalah harga susu peternak dalam posisi ketergantungan dengan industri pengolahan susu (IPS), harga yang ditetapkan seolah-olah tidak adil, peternak susah meningkatkan kualitas, kata Teguh.

Menurutnya, bagaimana mungkin produksi ditingkatkan kalau harga susu naik tidak layak, sementara as-

pek pakan dan kondisi kesehatan sapi tidak diperhitungkan.

Dia menambahkan, rencana kenaikan harga susu dari IPS sebesar Rp.100,- per liter dirasakan terlalu rendah, sebab dengan kenaikan tersebut belum mampu menutup tingginya harga pakan dan hijauan ternak. Tingginya harga konsentrat, biaya pakan hijauan ternak, dan inflasi menyebabkan harga susu yang ditetapkan IPS saat ini sudah tidak layak lagi. Kalau dinaikan sebesar Rp. 100 per liter sebenarnya tidak begitu menolong nasib para peternak, Ungkap Teguh.

Sementara harga susu saat ini rata-rata sebesar Rp.3.600 per liter, dan idealnya harga susu seharusnya Rp. 4.500 per liter. Sejauha ini produksi susu nasional baru mampu memenuhi 25% dari kebutuhan total, dan kekurangannya sebesar 25% atau 3,5 juta ternak ton berasal dari susu impor yang nilainya pertahun mencapai US\$ 600 juta – US\$ 700 juta.

Produksi susu nasional akan mengalami stagnasi pada tahun 2012. Sementara Dewan Persusuan Nasional memprediksikan pasokan susu lokal untuk memenuhi kebutuhan nasional akan terus mengecil, sedangkan pemenuhan dari impor akan semakin meningkat, tambah Teguh.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana mengemukakan, bahwa pasar susu segar tahun depan sekitar 3,5 juta ton. Pemenuhan kebutuhan pasar susu nasional dari produksi dalam negeri hanya 25% atau 800.000 ton, sisanya 75% atau 3,2 juta ton dipenuhi melalui impor. (Spy) foto: parle

Komisi V Minta Ditjen Perhubungan Darat dan Korlantas Lakukan Evaluasi

Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fungsi pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab, khususnya kepada perusahaan angkutan umum untuk menjamin keselamatan dan meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Banten, Polda D.I. Yogyakarta, Polda Jateng, dan Polda Jatim beserta jajaran terkait, Rabu (15/2) di gedung DPR.

Komisi V DPR juga mendesak Ditjen Perhubungan Darat dan Korps Lalu Lintas Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam evaluasi pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor.

Rapat kali ini mengundang mitra terkait untuk meminta penjelasan mengenai penyebab beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini. Komisi V DPR juga ingin meminta penjelasan mengenai langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Terjadinya beberapa kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini membawa keprihatinan anggota Dewan. Bahkan, Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Rendhy Lamadjido mengatakan, Departemen Perhubungan jangan sampai disebut sebagai mesin pembunuh massal.

Sementara Anggota Komisi V lainnya, Malkan Amin (F-PG) mempertanyakan mengapa kita tidak punya kemampuan untuk dapat mencegah dan meminimalisir jumlah kecelakaan yang semakin hari semakin meningkat.

Padaahal, katanya, kita telah memiliki UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin M. Said (tengah)

didalamnya telah mengatur secara rinci dan lengkap aturan-aturan berlalu lintas.

Dalam hal ini dia mempertanyakan, apakah UU Nomor 22/2009 ini sudah dijalankan secara konsisten. Menurut Malkan, disinilah pentingnya peran Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti betul dan paham isi dari undang-undang tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Djoko Susilo, bulan Januari 2012 terjadi kecelakaan sebanyak 10.169, dengan korban meninggal dunia 1.618 orang, luka berat 2.643 orang dan luka ringan 7.765 orang.

Kecelakaan yang menonjol bulan Januari-Februari 2012 terjadi di Tugu Tani Jakarta, Sumedang dan yang baru-baru ini terjadi kecelakaan bis Karunia Bhakti yang terjadi di Cisarua.

Penyebab yang terjadi dari berbagai kecelakaan-kecekaan tersebut menurut Djoko karena faktor manusia, kendaraan dan faktor jalan/ling-

kungan.

Kepolisian, katanya, telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah agar kasus serupa tidak terulang kembali diantaranya dengan Preemtif yakni membuat 13 program Road Safety, melaksanakan sosialisasi aturan berlalu lintas pada pengemudi dan pemilik perusahaan angkutan umum, dan melakukan audit keselamatan pada perusahaan angkutan umum.

Untuk tindakan preventif, diantaranya melakukan giat patrol di lokasi rawan kecelakaan, bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun Pos-pos penjagaan terpadu di lokasi rawan kecelakaan dengan maksud kecepatan menolong korban kecelakaan sehingga fatalitas korban tereliminir.

Bersama Dishub dan Diskes melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor dan pengemudi di terminal atau tempat-tempat tertentu.

Korlantas juga melakukan penegakan hukum terhadap jam kerja pengemudi serta penegakan hukum terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. (tt) foto:parle

Komisi X Dukung Mojokerto Kembangkan Situs Kerajaan Majapahit

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung Kabupaten Mojokerto sebagai daerah wisata. Upaya pelestarian sebagai ujung tombak penyelamatan situs peninggalan kerajaan Majapahit.



Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI saat meninjau situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Mojokerto

“Komisi X mendukung upaya Kabupaten Mojokerto mengembangkan dan melestarikan situs peninggalan Kerajaan Majapahit, selanjutnya akan membahas dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta,” kata Wakil Ketua Asman Abnur saat memimpin kunjungan spesifik Komisi DPR RI bidang Pariwisata di Mojokerto (9/2).

Dalam tinjauan langsung Komisi X terhadap destinasi pariwisata situs Trowulan, Asman mengatakan bahwa melestarikan peninggalan majapahit agar dapat dikenang karena disamping itu akan menimbulkan ekonomi kreatif yang luar biasa bermanfaat bagi masyarakat Mojokerto.

Bupati Kabupaten Mojokerto Mus-

tofa Kamal Pasa menjelaskan Mojokerto memiliki banyak potensi yang sangat mungkin dikembangkan. Salah satunya adalah potensi seni budaya. dalam rangka uri-uri budaya daerah, pemerintah saat ini mengembangkan bantengan, tari klasik dan mocapat, tradisi grebeg suro dan haul Syech Jumadil Kubro.

“Terkait dengan peninggalan kerajaan Majapahit, Kabupaten Mojokerto memiliki 200 peninggalan bersejarah. Namun sebagian besar belum tersentuh, hal inilah yang saat ini sedang diupayakan pemerintah daerah untuk dilakukan pemetaan guna pengembangannya, salah satunya adalah petilasan Jolotundo,” jelas Bupati. Sebagai putra daerah Mustofa merasa terpan-

gil untuk uri-uri budaya peninggalan kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan besar di Nusantara, yang dari bukti sejarah berada di wilayah Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Cita-cita untuk menggali kebesaran Kerajaan Majapahit merupakan kearifan lokal yang akan terus dikembangkan. Peninggalan-peninggalan yang ada perlu dirawat dan dikembangkan sehingga bisa menggali potensi kreatif yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf ekonomi warga masyarakat. Bupati merasa bahwa tanpa adanya dukungan dari Pusat, maka cita-cita tersebut mustahil terwujud. Sebab peninggalan Mojopahit adalah warisan luhur bangsa, yang dikenal hingga ke luar negeri. (as) foto:parle

Priyo Sambut Niat Tentara OPM Bangun Papua dan NKRI

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Panglima Tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) Alex Membry didampingi 11 orang petinggi organisasinya. Mereka datang menyampaikan pernyataan sikap dan kesiapan untuk mengawal pembangunan di tanah Papua dalam bingkai NKRI.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima Panglima Organisasi Tentara Merdeka (OPM) Alex Membry di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta

“Kita harus mencari cara terbaik bagaimana sama-sama membangun Papua. Organisasi yang kami bangun sudah dewasa, saya siap suruh OPM letak senjata dan republik letak senjata. Kita bersatu dibawah kerajaan Tuhan,” kata Alex Membry dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/12).

Ia secara khusus menyampaikan keprihatinan terhadap jalannya pembangunan yang sedang berlangsung di Papua. Dana Otsus (Otonomi Khusus) yang selama ini telah dikucurkan oleh pemerintah pusat menurutnya tidak sampai ke akar rumput. Masalah utama adalah ketidakmampuan pejabat di daerah.

“Kemana hasil otsus itu, segera ganti pejabat di Papua,” tegas Alex. Pada kesempatan itu ia memperkenalkan anggota rombongannya diantaranya Perdana Menteri OPM Martin

Wurait, Menteri Urusan Agama Nico Kaufu dan Sekjen Markus Bonai.

Rombongan didampingi Pendeta John Ramenday, dari Gereja Cornerstone, yang juga Rektor Sekolah Penginjil Pemulihan Papua, di Jayapura. “Bapak-bapak ini baru saja menyelesaikan kuliah di kampus saya, jadi mereka sudah bergelar STh (Sarjana Theologi),” jelasnya. Ia berharap Wakil Ketua DPR dapat membantu agar Panglima Tentara OPM bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Priyo Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas pernyataan sikap yang disampaikan Panglima Tentara OPM dan jajarannya. “Ini adalah penghormatan bagi kita semua dan patut kita syukuri, seperti oase yang datang pada saat pemberitaan di negeri ini dipenuhi masalah politik dan hukum,” paparnya. Ia berjanji segera mengusahakan seluruh rombongan dapat diterima Presiden SBY.

Ketua Tim Desk Urusan Papua dan Aceh ini menjelaskan pemerintah dan DPR sangat memperhatikan percepatan pembangunan di dua propinsi paling Timur dan Barat Indonesia ini. Terbukti dengan dikucurkannya dana otsus yang untuk Papua sampai saat ini sudah mencapai Rp.28,9 triliun. “Untuk Papua terbesar dibanding provinsi lain, ada permasalahan tapi mari kita selesaikan bersama,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu Priyo juga mengundang Alex Membry beserta pimpinan OPM lain untuk menyimak Rapat Kerja DPR dengan Menko Polhukam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Pejabat Gubernur Papua dan Ketua DPR Papua. “Saya mengundang dengan hormat untuk mengikuti pertemuan besok (Kamis 16/2) dari balkon dan nanti akan saya perkenalkan kepada seluruh peserta rapat.” Alex menyambut undangan tersebut dan menyatakan akan hadir. (iky)/foto:iw

Menkumham Diminta Mundur Kalau Kalah di PTUN

Sebagian besar Fraksi di Komisi III menyatakan tetap tidak dapat menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin terkait kebijakan pengetatan remisi bagi koruptor. Pembantu presiden dari Partai Demokrat ini bahkan diminta mengundurkan diri apabila dinyatakan kalah dalam gugatan di PTUN yang diajukan beberapa komponen masyarakat.



Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin

“Tadi Pak Menteri mengatakan kalau gugatan publik menang di PTUN tidak akan banding, ini aneh sebenarnya kalau yakin pada kebijakan itu pertahankan sampai ke ujung dunia. Ini menunjukkan pemerintah tidak percaya diri, tidak mau kehilangan muka maka ditunggu putusan PTUN. Seharusnya kalau kalah di PTUN Pak Menteri mundur, itu yang kami tunggu,” kata anggota Komisi III dari FPG, Bambang Soesatyo dalam rapat kerja dengan Menkumham di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/12).

Bambang tegas menyebut akan langsung menggunakan hak interpelasi, karena kebijakan moratorium remisi bagi koruptor telah memaksa presiden turut melanggar undang-undang dan konstitusi. Ia mengaku telah mendapat dukungan dari beberapa anggota DPR untuk mengajukan penggunaan hak ini kepada pimpinan.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III Ahmad Yani. “Sikap fraksi kami jelas SK pengetatan remisi bertentangan dengan konstitusi, UU dan PP. Saya ingatkan kalau PTUN nanti menyatakan kebijakan itu salah, Pak Menteri telah berkontribusi terhadap Presiden melanggar konstitusi dan UU,” imbuhnya. Ia-pun berketetapan hati menyetujui penggunaan hak interpelasi, meminta keterangan kepada Presiden.

Setelah mendengar penjelasan dari Menkumham pada rapat kerja yang merupakan lanjutan dari dua kali pertemuan sebelumnya 7 dan 14 Desember tahun lalu, sidang diwarnai interupsi yang meminta rapat tidak dilanjutkan.

Pembelaan disampaikan anggota Komisi III dari FPD seperti Saan Mustafa dan Ruhut Sitompul. “Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi. Rakyat miskin karena ko-

rupsi. Rakyat dibelakang kami dalam memberantas korupsi.” Politisi Partai Demokrat tetap bertahan rapat tetap dilanjutkan.

Pimpinan sidang Azis Syamsudin akhirnya memutuskan menskors rapat untuk melangsungkan lobi antar pimpinan paksi menyikapi apakah rapat dilanjutkan atau tidak. Hasilnya dari 8 fraksi yang mengikuti rapat kerja hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta rapat diteruskan. “6 fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar, PDIP, P3, PAN, PKS, Hanura meminta rapat dihentikan, sedangkan fraksi Gerindra abstain,” papar Azis yang juga Wakil Ketua Komisi III.

Dalam penjelasannya Menkumham mengingatkan pelayanan terhadap warga binaan bersandar pada beberapa Undang-undang antara UU no.12/1995 tentang Pemasaran, PP no.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan disempurnakan dengan PP no.28/2006.

“Kita jangan lupa bahwa kita telah meratifikasi satu konvensi PBB dalam perang melawan korupsi yang kemudian menjadi hukum positif kita. UU no.7/2006 pasal 30 ayat 5 jelas memberikan satu kewajiban kepada negara-negara peserta konvensi untuk dalam memberikan pembebasan bersyarat atau remisi pada pelaku tindak pidana korupsi diberlakukan syarat yang lebih khusus, ini diterjemahkan tidak terlalu gampang,” tegasnya.

Pada bagian lain Menkumham menyatakan dapat menerima keputusan Komisi III untuk tidak melanjutkan rapat. “Saya menyatakan menghormati keputusan tersebut,” demikian Amir. (iky) foto:wy/parle

Perlu Sinergi untuk Wujudkan Target Surplus Beras 10 Juta Ton

Tahun 2014 pemerintah SBY mencanangkan 10 juta ton surplus beras nasional. Untuk mewujudkan rencana tersebut diperlukan kerjasama yang baik antar pihak terkait.

Kerjasama dan sinergi program yang komprehensif perlu dilakukan antara Kementerian Pertanian dengan Bulog dan kementerian terkait lainnya. Hal itu dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI Wan Abu Bakar (F-PPP) saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (9/2).

“Untuk menuju swasembada pangan khususnya beras, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan kementerian terkait harus melakukan program yang lebih komprehensif. Jadi tidak bisa hanya dari Kementerian Pertanian saja. Faktanya sekarang ini produksi beras kita masih minus, oleh karena itu kita masih melakukan impor beras yang cukup besar, hampir 2 juta ton per tahun.” Ujarnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan fokus dalam melakukan pembenahan masalah pertanian yang ada. Selain itu, dana yang tersedia juga perlu lebih fokus dalam penggunaannya. Misalnya dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk membangun infrastruktur, seperti memperbaiki sistem irigasi yang rusak.

Lebih jauh Wan Abu Bakar menyampaikan, salah satu penyebab tidak efektifnya bantuan yang diberikan pemerintah dalam pertanian, dikarenakan tumpang tindih program dan

ketidakjelasan pembagian wewenang antara daerah dan pusat. Program yang ada di daerah dan pusat juga tidak bersinergi.

“Antara program provinsi dan kabupaten sering tidak bersinergi dengan program kementerian. Maunya kewenangan di kabupaten itu jelas. Kemudian kewenangan di provinsi harus jelas. Begitu juga kewenangan dari kementerian atau pusat harus jelas. Jangan nanti di provinsi ada program yang juga sama dengan program kementerian pusat. Ini tidak match dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu ada pembedaan tugas yang jelas. Jadi daerah tahu apa yang perlu disiapkan,” tukas Anggota DPR RI asal provinsi Riau ini.

Selain itu Bulog sebagai lembaga yang memiliki kaitan langsung dengan pangan juga harus merubah orientasinya. Jangan hanya fokus menangani masalah kekurangan pangan. Tapi Bulog juga

harus dapat membeli beras petani Indonesia dengan harga yang tinggi. “Ini bisa membantu stabilitas harga beras sehingga tidak dipengaruhi oleh para tengkulak. Para petani juga akan merasa lebih aman karena yakin ga-



Anggota Komisi IV DPR RI, Wan Abu Bakar

bah atau berasnya akan di beri harga tinggi,” ucapnya mengakhiri pembicaraan. (Rd.Tvp) foto:parle

Komisi V DPR Tegur Ketua KNKT

Komisi Perhubungan DPR RI menegur Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan jajarannya yang selama ini tidak satupun hasil investigasi kecelakaan-kecelakaan darat, kereta api, laut maupun udara yang disampaikan kepada Komisi V DPR.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat rapat dengar

pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Ketua

KNKT beserta jajarannya, Rabu (15/2) di gedung DPR.

Pagi itu, Komisi V DPR mengun-



Jajaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)



Rapat dengar pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Ketua KNKT beserta jajarannya

dang mitra-mitranya sehubungan dengan keprihatinan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di awal tahun 2012 sehingga banyak menenggut korban jiwa.

Komisi V ingin mengetahui secara pasti apa penyebab dari kecelakaan itu terjadi, dan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar ke depan tingginya angka kecelakaan dapat ditekan sekecil mungkin.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said, Yasti mengatakan, sudah dua setengah tahun masa bakti DPR periode 2009 – 2014 melaksanakan tugasnya, namun tidak satu pun hasil investigasi yang disampaikan kepada Komisi V.

Yasti juga mengatakan, hasil rekomendasi dari KNKT terhadap terjadinya kecelakaan juga tidak pernah disampaikan Komisi V. “Bagaimana kami akan melakukan pengawasan, jika hasil rekomendasi dan investigasi itu tidak pernah kami terima,” katanya.

Padahal, tambahnya, hasil investigasi ini sangat diperlukan untuk melakukan pengawasan lebih jauh terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut karena faktor manusia, alam atau karena sarana dan prasarannya. Tentunya hal ini perlu dicarikan solusinya agar Komisi V DPR dan Pemerintah dapat bersama-sama mencari pemecahan terbaik untuk mengatasi berbagai penyebab kecelakaan tersebut.

Yasti menambahkan, sudah beberapa kali Komisi V DPR mengundang jajaran KNKT. Pihak KNKT selalu mengatakan kendala yang dihadapi di internalnya adalah kurangnya SDM yang ada di jajarannya khususnya tenaga investigator.

Namun Yasti merasa heran, jika kendala itu yang menjadi permasalahan kenapa pihak KNKT tidak segera mencari solusi dengan menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kementerian Perhubungan.

Jika kendala itu disampaikan, dia yakin Kementerian Perhubungan tidak akan berdiam diri untuk segera mencari solusi terbaik bagi permasalahan tersebut. Karena, tanpa dukungan investigator yang profesional dan memadai, maka kinerja KNKT akan banyak mengalami hambatan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KNKT Tatang Kurniadi menyampaikan laporan KNKT dapat diakses melalui web site. Dalam hal ini, KNKT berupaya untuk transparan kepada masyarakat agar masyarakat luas dapat mengaksesnya.

Namun, katanya, dia berjanji akan segera menyampaikan hasil rekomendasi dan investigasi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi kepada Komisi V DPR.

Diakuinya, kendala yang dihadapi di jajarannya adalah kurangnya tenaga investigator, Saat ini, KNKT hanya memiliki 53 investigator yakni 14 orang

tenaga investigator kereta api, 8 orang tenaga investigator kelautan, 29 orang investigator udara dan hanya dua orang investigator darat.

KNKT telah melakukan identifikasi terhadap perkiraan faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi. Dari hasil investigasi kecelakaan seluruh moda transportasi tahun 2007-2012 yang sudah diselesaikan, faktor manusia (human faktor) sebagai salah satu faktor penyebab yang paling berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan yaitu masing-masing sebesar 47,8% (udara 29,7%, laut 5,6%, jalan 13,5%, kereta api 3,9%).

Faktor teknis yang terdiri dari faktor sarana, prasarana dan operasional juga berkontribusi sebesar 47,8% (udara 19,1%, laut 7,9%, jalan 3,4%, kereta api 17,4%). Sedangkan faktor environmental atau external berkontribusi sebesar 4,5% (udara 2,8%, kereta api 1,7%).

Tatang mengatakan, dari pelaksanaan investigasi KNKT telah disampaikan rekomendasi-rekomendasi keselamatan kepada pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan yang serupa agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pada tahun 2007 – 2012, KNKT telah menyampaikan 769 rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, dengan rincian rekomendasi udara 272, laut 250, kereta api 150 dan jalan 97. (tt) foto:parle

RUU Daerah Kepulauan Perlu Pendalaman Lebih Jauh

Beberapa Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berpandangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang sekarang dibahas Panitia Kerja (Panja) perlu dilakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh.

Rancangan Undang-Undang ini, diharapkan mampu mendorong untuk melakukan akselerasi bagi pembangunan daerah kepulauan.

Demikian disampaikan Anggota Baleg Ali Wongso saat memberikan masukannya terkait dengan pembahasan RUU Daerah Kepulauan, Senin (13/2), di gedung DPR. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ida Fauziah juga dihadiri dua perwakilan dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yakni Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Maluku.

Ali Wongso mengatakan, dalam kenyataannya memang ada disparitas/perbedaan yang relatif menyolok antara daerah kepulauan dengan daerah yang bukan kepulauan. Walaupun diakui, banyak juga daerah-daerah yang bukan kepulauan kondisinya hampir sama dengan daerah kepulauan.

“Ini menjadi sebuah tantangan besar, bagaimana membuat UU ini supaya elegant menyelesaikan persoalan daerah kepulauan ini tanpa menimbulkan persoalan baru,” kata Ali Wongso.

Karena jangan sampai, dengan perlakuan-perlakuan khusus ini, nantinya juga akan menimbulkan kecemburuan bagi daerah-daerah lainnya.

Dia menambahkan, jika pendekatan yang dilakukan melalui affirmative dengan program, hal ini pernah dicoba dan dilakukan. Tapi kalau pendekatan yang dilakukan lebih spesifik melalui pendekatan kuantitatif seperti halnya yang diberlakukan di Aceh dan Papua, tentunya membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

Disinilah perlunya mengundang pihak-pihak terkait agar dapat memberikan masukan dan merespons keinginan dari para gubernur daerah kepulauan. Untuk itu dia mengusulkan, sebaiknya Baleg mengundang ke-

menterian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan kementerian lainnya yang terkait untuk ikut men-



Anggota Baleg DPR RI, Ali Wongso



Jajaran perwakilan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yaitu Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Maluku

dengar dan memberikan masukan terkait pembahasan RUU tersebut.

Gubernur Maluku Karel Alberth Ralahu yang mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan menyampaikan, pada dasarnya perlakuan khusus terhadap Daerah kepulauan (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) merupakan suatu proses perlakuan dalam kebijakan Pemerintah terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada karakteristik daerah kepulauan.

Pentingnya perlakuan khusus bagi daerah kepulauan ini mengingat karakteristik kepulauan yang begitu luas wilayah laut yang lebih besar

dari wilayah darat, sehingga pulau-pulau kecil yang terpisah karena laut mendapatkan perlakuan sebagaimana daerah dengan karakteristik kontinental. Perlakuan khusus ini, kata Karel, difokuskan pada bidang-bidang vital pengorganisasian wilayah kepulauan.

Adapun perlakuan khusus yang perlu diberikan pada daerah kepulauan yaitu perlakuan khusus infrastruktur kelautan, perlakuan khusus perikanan dan kelautan, perlakuan khusus pendidikan dan kesehatan, perlakuan khusus kesatuan masyarakat hukum adat, perlakuan khusus kadasterisasi laut, luas wilayah laut dan kewenangan serta keuangan daerah.

Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan berpendapat, rumusan perlakuan

khusus pembangunan infrastruktur dalam RUU Daerah Kepulauan Pasal 22 sudah memenuhi harapan normatif adanya undang-undang ini, maupun harapan dan keinginan masyarakat pada daerah-daerah kepulauan.

Akan tetapi, katanya, perlu diingat bahwa infrastruktur kelautan yang baik dan berkualitas hendaknya diikuti dengan pembangunan infrastruktur daratan (jalan) dan udara (Bandar udara) yang berkualitas juga.

Perlakuan khusus perikanan dan kelautan mengingat daerah-daerah kepulauan memiliki karakteristik akuatik

teresterial (laut lebih luas dari daratan). Seperti misalnya, Provinsi Maluku 92,6% wilayahnya laut, Provinsi Kepulauan Riau 96%, Provinsi Nusa Tenggara Timur 80,8%, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 79,9%, Provinsi Nusa Tenggara Barat 59,13%, Provinsi Sulawesi Utara 95,8% dan Provinsi Maluku Utara 69% wilayahnya laut.

Realitas karakteristik wilayah ini memastikan bahwa sumberdaya alam yang dominan adalah sumberdaya perikanan dan kelautan. Namun masalahnya, provinsi-provinsi kepulauan tersebut selama ini tidak mendapat

kan manfaat secara langsung dari pengelolaan sumberdaya alam terutama perikanan.

Untuk itu, dibutuhkan pengaturan normatif untuk perlakuan khusus dengan rumusan norma, perhitungan dana bagi hasil bidang perikanan dan kelautan hendaknya memperhitungkan persentase tertentu untuk kekhususan daerah kepulauan.

Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut ditentukan berdasarkan ijin perikanan yang dikeluarkan Pemerintah. (tt) ry/parle

DPR Minta Pertamina Pengawasan BBM Bersubsidi Ditingkatkan

DPR meminta Pertamina mengontrol pengawasan BBM Bersubsidi.

Pasalnya banyak ditemui kebocoran terhadap program BBM bersubsidi tersebut



Wakil Ketua Komisi VII DPR, Achmad Fahrial



“Perlu kontrol dan peran Pertamina terhadap BBM bersubsidi karena ditemui banyak oknum yang melakukan kebocoran baik dari pihak swasta, Pemda bahkan dari oknum Pertamina sendiri,” jelas I Wayan Gunastra dari Partai Demokrat saat Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fahrial di Gedung Nusantara I, Selasa, (14/2).

Menyinggung kebutuhan dalam domestik, tegasnya, Pertamina seharusnya mampu memenuhi kebutuhan didalam negeri dengan menggenjot kilang yang ada. Melalui cara ini diharapkan dapat menguasai pasar domestik. “Jadi kita tidak perlu ada pemain asing di Indonesia kedepannya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu dia mempertanyakan gambaran Dirut Pertamina langkah apa saja yang dilakukannya kedepan. “Artinya apakah ada program peningkatan kebutuhan dalam negeri dengan menggenjot kilang yang ada sehingga diharapkan dapat membangun industri turunan yang membuka lapangan pekerjaan,” jelasnya. (si) foto:parle



Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan jajarannya

Komisi X DPR RI Tinjau Kesiapan PON 2012

Sehubungan dengan semakin dekatnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, Komisi X DPR RI, Jumat (10/2) melakukan kunjungan ke Pekanbaru Provinsi Riau guna melihat langsung kesiapan daerah ini menjadi tuan rumah PON XVIII tahun 2012.

Di Pekanbaru, Tim Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Utut Adianto melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Riau Rusli Zaenal beserta jajarannya, serta panitia penyelenggaraan PON tahun 2012 di Auditorium kantor Gubernur Riau

Dalam kesempatan ini, Gubernur Riau menjelaskan bahwa segala persiapan yang telah dilakukan untuk menggelar event olahraga nasional terbesar ini, Pemprov Riau tengah membangun venue-venue yang akan dihunikan untuk tempat bertanding serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta bantuan dukungan dari DPR, agar pemerintah pusat dapat membantu Riau dalam hal penganggarannya, "Kita memang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembangunan venue, serta sarana dan prasarana pendukung PON lainnya,"jelas Rusli.

Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau dalam menggaet dana dari pemerintah pusat melalui APBN untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, sebab hingga saat ini Pemprov Riau masih kekurangan dana untuk keperluan pelaksanaan PON tersebut setidaknya Rp 290 milyar.

Utut menjelaskan, untuk menyusutkan pelaksanaan PON 2012, yang tinggal beberapa bulan lagi, pemerintah pusat melalui dana APBN hanya membantu penyelenggaraan sebesar Rp.150 miliar, sementara kekurangan dana untuk penyelesaian venues itu sebesar Rp. 290 miliar, "Kekurangannya nanti akan dipikirkan,"kata nya.

"Untuk anggaran PON 2012 itu sudah diketuk palu pada Desember 2011



Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat meninjau stadion tempat berlangsungnya PON XVIII 2012

lalu dan bantuan penyelenggaraan PON Riau yang sudah disahkan sebesar Rp.150 miliar,"jelasnya.

Pelaksanaan PON ini, sebut Utut, tingkat kesulitannya sama dengan Sea Games. Bahkan di PON itu cabang olahraganya lebih banyak. Pesertanya juga lebih banyak. Bedanya hanya regional dan nasional. Untuk bantuan pusat, jika dibandingkan dengan PON Kaltim 2008 lalu, Riau lebih besar.

"Cabang olahraga di Riau lebih sedikit. Jika di Kaltim itu 43 cabang, di Riau 39 cabang. Namun demikian, diharapkan untuk PON di Riau ini dapat menjadi benchmark bagi atlet, dan ini menjadi fundamen olahraga nasional," tuturnya.

Menanggapi soal bantuan APBN hanya Rp 150 milyar tersebut, Gubernur Riau, Rusli Zainal, mengatakan sudah menyiapkan dana cadangan. Namun demikian pihaknya tetap berharap pada APBN.

"Kita sudah punya dana cadangan. Namun kita tetap berusaha dulu untuk bantuan dari APBN. Harapan saya cukup besar untuk mendapatkan bantuan itu. Insya Allah akan didapatkan. Jika tidak dapat, nanti juga masih ada mekanisme di APBD Perubahan," kata Rusli Zainal.

Menurut Rusli Zainal, sebagian venue sudah selesai dibangun, dan sebagiannya masih dalam tahap pembangunan. Hingga saat ini Pemprov Riau masih kekurangan dana untuk menyelesaikan venue yang sedang dibangun dan juga untuk pembangunan sarana serta prasarannya.

Karena itu, Rusli Zainal mengharapkan dukungan dari Komisi X DPR supaya pemerintah pusat dapat membantu Pemprov Riau dalam hal penganggaran untuk keperluan PON ini. "Kita memang masih membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembangunan venue dan sarana serta prasarana pen-

dukung PON,” ungkapnya.

Sementara itu, Utut Adianto menambahkan komitmen pemerintah pusat untuk membantu menyukseskan PON di Riau ini sangat besar. “Soal percepatan pencairan anggaran itu, berdasarkan laporan masih ada beberapa venue dan kekurangan sebesar Rp 290 milyar, dan ini harus dipikirkan,” jelasnya

Pemerintah pusat pantas memberikan bantuan karena permintaan bantuan untuk PON di Riau ini, jauh

lebih kecil jika dibandingkan untuk SEA Games, sedangkan untuk melaksanakannya lebih berat, karena jumlah kontingennya lebih besar dibandingkan SEA Games,”kata Utut.

Ia menambahkan, penyelenggaraan PON ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi juga tanggung jawab pemerintah pusat.

Hal senada di ungkapkan oleh anggota Komisi X DPR Zulfadhli, menurutnya pemerintah pusat wajib membantu dana untuk PON Riau, sebab

nantinya tidak hanya penyelenggaraan PON saja, tapi juga untuk menyelenggarakan Islamic Solidarity Games (ISG) yang rencananya akan dilaksanakan tahun 2013 mendatang.

“Menurut saya Venue-venue PON yang saat ini sedang dibangun tidak hanya untuk keperluan PON saja, tapi nantinya juga akan digunakan untuk ISG yang akan diikuti negara-negara Islam di dunia, dan tentunya ini akan membawa citra bagi Indonesia,” jelasnya.(nt)/ foto:Nita/Parle.

Komisi IV DPR dengan Pemerintah Tidak Sepaham

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, saat ini telah memasuki tahap Pembahasan Tingkat 1 di Komisi IV DPR bersama dengan Pemerintah, namun pemerintah dengan Dewan tidak sepaham.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron yang sekaligus memimpin rapat, keterangan ini disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar, rapat tersebut dilakukan di ruang rapat Komisi IV DPR Senayan Jakarta, Rabu, (15/2) siang.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron juga menambahkan, Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak

asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Herman Khaeron juga mengatakan, Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan

masyarakat.

Dia menjelaskan, bahwa RUU tentang pangan atas UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan (RUU tentang Pangan), saat ini telah memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR bersama dengan Pemerintah, namun dalam pembahasan tersebut komisi IV dan Pemerintah terdapat perbedaan penting yang sampai saat ini belum dapat disepakati.

Perbedaan tersebut terkait dengan bagaimana seharusnya mengatur

tentang ketersediaan pangan, baik dari segi produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan, pemasukan pangan dari luar negeri, pengeluaran pangan dari wilayah negara RI, pengendalian pangan, dan termasuk juga krisis pangan, kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Herman menegaskan, bagaimana seharusnya mengatur keterjangkauan dan keamanan pangan, serta bagaimana seharusnya kelembagaan dalam RUU ini dibentuk, tegas herman.

Dikatakan juga bahwa Panitia Kerja RUU tentang Pangan bersama-sama dengan pemerintah, telah mengadakan forum group Discussion di tiga perguruan tinggi, di Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, dan di Institut Pertanian Bogor untuk memperoleh masukan dalam pembahasan RUU tentang Pangan dari hasil pertemuan tersebut Dewan telah memperoleh banyak masukan yang positif.

Numun Komisi IV DPR merasa dan memandang bahwa masukan-masukan yang diperoleh tersebut dirasa belum maksimal untuk menyelesaikan pembahasan RUU ini, untuk itu Komisi IV juga mengundang para pakar pangan untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif terkait dengan RUU tentang pangan. (Spy)foto: parle

Jika Kepala Daerah Tidak Peduli, Peralatan e-KTP Hanya Jadi Rongsokan

Proses pendataan e-KTP yang dilakukan pemerintah merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Adminduk). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menargetkan proses pendataan paling lambat selesai pada 2012. Meskipun masih banyak kekurangan di beberapa sektor.



Warga saat mengikuti proses pembuatan e-KTP

Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Rusli Ridwan (F-PAN) mengatakan, DPR bertekad bulat untuk mensukseskan program e-KTP. Walaupun di sana sini masih banyak kekurangan, prosesnya hingga saat ini masih berjalan terus.

“Kita di DPR bertekad bulat mensukseskan ini, karena ini adalah amanat dari Undang-undang, jadi harus diwujudkan,” ucapnya menegaskan. Rusli mengungkapkan, meski di sana sini masih ada masalah, tapi dengan tekad dan semangat seperti apa yang disampaikan Mendagri, dirinya percaya pada akhir tahun 2012 ini bisa selesai. Memang ada beberapa masalah yang rumit, seperti persoalan peralatan rusak yang harus dibawa ke Jakarta. “Tapi soal itu sudah ada jalan keluarnya, yakni peralatan yang rusak cukup dibawa ke provinsi.” Ujar Rusli ketika ditemui dikantornya.

Anggota DPR RI asal provinsi Banten ini juga mengatakan, sebenarnya permasalahan muncul bukan pada proses pendataan yang ditargetkan selesai di tahun 2012 ini. Tapi bagaimana kelanjutan pendataan setelah tahun 2012. Ditambah lagi pada tahun 2014 akan diadakan pemilu.

“Yang jadi masalah adalah pasca 2012, karena kelahiran jalan terus, yang ke angka 17 tahun akan bertambah terus. Bagaimana pula yang berumur 15 dan 16 tahun naik ke atas, bagaimana pendataannya,” imbuhnya. Jadi, menurutnya yang berat adalah pasca 2012. “Untuk target 2012 insya Allah dengan tekad dan semangat akan selesai, walaupun tidak sempurna.” Ucap anggota Fraksi PAN ini. “Kalau kita pesimis namanya bukan mental pejuang. Karena amanat undang-undang, jadi kita harus optimis saja lah,” tambahnya.

UU No. 23 tahun 2006 menyatakan,

administrasi kependudukan merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota. Atau dengan kata lain merupakan tugas dari kepala daerah. Hal ini menurutnya juga dapat menimbulkan masalah. Jika kepala daerah tidak serius dengan program e-KTP ini, maka semua usaha yang telah dilakukan akan sia-sia saja. “Peralatan yang sudah dibeli dengan harga mahal pun hanya akan menjadi barang rongsokan saja.” Ucapnya.

“Pertanyaannya adalah jika kepala daerah, bupati, walikota atau gubernur tidak serius menjalankan program e-KTP ini, ke depannya bagaimana?,” ujarnya mempertanyakan. Bagaimana pula dengan peralatan yang ada di kecamatan berikut operatornya kedepan. “Kalau bupati/walikota cuek, dan operator cuek maka program tidak jalan, akhirnya semua akan jadi barang rongsokan saja,” Ujarnya mengakhiri pembicaraan. (Rd/Ctr.Tvp) foto:parle

Baleg Minta Masukan Masyarakat Luas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang seluruh masyarakat luas untuk memberikan saran, kritik dan masukan Rancangan Undang-Undang tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Pangan Olahan agar RUU ini dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.



Wakil Ketua Baleg DPR RI, Dimiyati Natakusumah

Pernyataan ini disampaikan Ketua Panja yang juga Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah saat Konferensi Pers, Selasa (7/2) di Press Room DPR,

Dimiyati mengatakan, RUU Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan ini merupakan salah satu prioritas Prolegnas Tahun 2011 dan sekarang diluncurkan sebagai prioritas Tahun 2012 untuk diselesaikan.

RUU ini, katanya, tidak dapat diselesaikan tahun lalu karena memerlukan pengkajian mendalam dan perdebatan dari stakeholders untuk mencari masukan yang komprehensif untuk perumusan RUU yang lebih baik.

Dimiyati menambahkan, RUU ini sangat diperlukan mengingat saat ini masih diproduksi dan diperdagangkan produk-produk Sediaan Farmasi,

alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan yang tidak aman bagi kesehatan. Demikian juga, kegiatan atau proses produksi pangan untuk konsumsi anak di bawah usia 5 (lima) tahun masih belum memberikan jaminan keamanan kesehatan dan memiliki resiko tinggi yang sangat membahayakan pertumbuhan anak.

Banyak produk Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat yang berasal dari negara lain tidak memenuhi standar kesehatan sehingga berdampak buruk bagi kesehatan dan keamanan masyarakat.

Bila ditinjau dari segi yuridis UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, UU No.23/1997 tentang Psikitropika, UU No.7/1996 tentang Pangan dan

UU No.. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen belum secara tegas, integratif dan komprehensif mengatur Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan.

Jika dilihat tinjauan tersebut, belum ada satu undang-undang yang menjadi landasan yang kuat dan komprehensif tentang sistem pengaturan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan di Indonesia.

Dimiyati menjelaskan, pengaturan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, PKRT dan Pangan Olahan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko pengadaan, pembuatan dan peredaran Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu serta peredaran Pangan Olahan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu dan gizi.

Selain itu, juga bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan/atau penggunaan yang salah dari Sediaan Farmasi, alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pengaturan RUU ini, kata Dimiyati, meliputi penetapan standar dan persyaratan, pengadaan dan pembuatan, penandaan dan informasi, peredaran, impor dan ekspor, promosi dan iklan dan yang terpenting memasukkan partisipasi masyarakat.

Dimiyati optimis RUU ini dapat segera dibahas, untuk itu bantuan masyarakat dan media massa sangat diharapkan untuk dapat memberikan berbagai masukan berharga guna penyempurnaan draft RUU dimaksud. (tt) foto:ry/parle

“Pemilu kita high cost, dengan suara terbanyak akhirnya caleg satu partai bisa bertempur merebut kursi. Dalam pemilu kemaren kader terbaik yang berhasil menjadi wakil rakyat tidak banyak, yang menonjol adalah orang punya duit daftar ke partai dan menang pemilu,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumsel, Selasa (14/2/12).

High cost politic juga terjadi pada pemilihan kepala daerah - gubernur, walikota dan bupati. Sudah menjadi pembicaraan publik untuk maju dalam pilkada, calon bupati harus menyiapkan anggaran setidaknya Rp. 10 miliar. “Dari mana uangnya, akhirnya setelah terpilih korupsi untuk mengembalikan pinjaman modal atau membalas budi baik pendukung,” lanjutnya.

Ia meminta mahasiswa tidak gampang menyalahkan ketika perilaku korupsi meluas. Segenap pihak menurutnya patut memikirkan solusi bagi politik biaya tinggi yang menyuburkan perilaku korupsi. Salah satu usulan yang didukungnya adalah pemilihan gubernur cukup dilaksanakan oleh wakil rakyat di DPRD. Konstitusi tidak memerintahkan pemilihan gubernur secara langsung tetapi lewat pilkada yang demokratis.

DPR saat ini lanjutnya sedang melakukan pembahasan RUU terkait pemilu. Segenap pihak harus memberikan masukan untuk menemukan sistem pemilu yang terbaik bagi bangsa dan tidak berbiaya tinggi. Beberapa usulan yang mengemuka diantaranya bagaimana meningkatkan peran partai dalam menentukan kader terbaik menjadi caleg peserta pemilu. “Mahasiswa jangan hanya marah ke DPR kalau tidak berkualitas, demo juga partainya agar mengirim caleg yang bagus ke DPR,” imbuh Marzuki disambut tepuk tangan mahasiswa.

UU Parpol menurutnya patut membuka ruang agar partai dapat mencari pendanaan yang halal untuk menggerakkan roda organisasi. Baginya pilihan ini dapat mendukung upaya partai menjadi lebih mandiri. Sekarang sumber pendanaan bergantung pada iuran anggota, serta setoran anggota partai yang menjabat di eksekutif dan legisla-

Korupsi Meluas karena Politik Biaya Tinggi

Salah satu tantangan keberhasilan pemerataan pembangunan Indonesia adalah meluasnya tingkat korupsi. Kejahatan luar biasa ini tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat tapi juga merambat ke daerah-daerah. Perilaku korup terdorong oleh sistem politik yang cenderung berbiaya tinggi - high cost politic.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat menyampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan

tif. Ini menurutnya mengundang ruang penyimpangan penggunaan anggaran negara.

“Kita baru berdemokrasi 13 tahun pasca Orde Baru, tapi capaiannya sudah banyak bahkan ada yang menyebut demokrasi kita sudah lebih baik dari Amerika,” ujarnya. Namun upaya perbaikan kualitas demokrasi patut terus dilakukan. Politisi Partai Demokrat ini memberi contoh demokratisasi di Cina yang menurutnya patut dipelajari. Negeri tirai bambu itu juga melangsungkan pemilu mulai dari tingkat paling bawah setingkat desa, bedanya parpolnya hanya satu partai komunis. “Disana sistem politik menjaga senioritas alasannya kalau bangsa Cina yang besar itu dipimpin tokoh dibawah 50 tahun negara bisa pecah karena belum memiliki kearifan.”

Ketua DPR mengajak mahasiswa yang mengikuti kuliah umum untuk sejak dini bergabung dengan partai politik. “Orang baik-baik masuklah ke parpol, persoalannya tidak banyak orang baik yang masuk parpol,” tandasnya. Sebagai sekjen partai ia mengaku pernah kesulitan mencari caleg

perempuan menjelang Pemilu Legislatif 2004. Akhirnya partai mengusulkan kandidat dengan kualitas seadanya dan terpilih. “Tahu-tahu menjadi anggota DPR, inilah situasi yang kita hadapi sekarang.”

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Anzulian Rifai mengakui political recruitmen partai politik masih bermaslah. “Saya provokasi mahasiswa kalau mau merubah DPR, yang anda kata-kata setiap hari itu jadilah politikus, tamat sarjana hukum kembalilah ke desa, jadi pengurus parpol di tingkat ranting kemudian naik berjenjang,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa.

Dalam kesempatan itu Ketua DPR menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Unsri dengan PT Pusri. Perusahaan BUMN pupuk ini berkomitmen mendukung mahasiswa fakultas hukum meraih prestasi terbaik. Program yang ditawarkan diantaranya beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kesempatan berkarir di perusahaan kebanggaan masyarakat Sumsel ini. (iky) foto:parle



Rapat Kerja Tim Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dengan Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DPR Aceh dan Pejabat Gubernur Aceh di Gedung Nusantara, Jakarta 16 Februari 2012. foto:RY



Tim Pengawas Century yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengadakan Raker dengan Jaksa Agung Basrief Arief, di Gedung DPR, 8 Februari 2012 foto:IW



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Panglima Tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) Alex Membry didampingi 11 orang petinggi organisasinya di Gedung DPR RI, 15 Februari 2012. foto:IW

